

## Jokowi dan Ibu Negara Iriana Bertolak ke Thailand untuk Hadiri KTT APEC

**BALI (IM)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo bertolak menuju Bangkok, Thailand, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (17/11).

Presiden akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2022. "Hari ini, saya dengan Ibu Negara dan delegasi terbatas akan berangkat menuju Bangkok, Thailand. Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT APEC hingga besok Jumat tanggal 18 November 2022," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya sebelum lepas landas.

Jokowi menyatakan, KTT APEC merupakan rangkaian terakhir KTT setelah ASEAN di Kamboja dan G20 di Bali, Indonesia.

Presiden menyampaikan, fokus utama Indonesia dalam KTT APEC adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Prinsipnya, leave no one behind, Transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini," jelasnya.

APEC mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) dunia. Selain itu, APEC pun menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan

Asia Pasifik. "APEC harus terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik," ikatannya.

Rombongan Kepala Negara akan segera kembali ke Tanah Air setelah KTT APEC selesai pada Jumat (18/11/2022).

"Saya akan kembali ke Indonesia, Insya Allah, tanggal 18 November malam," kata Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Thailand antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksa TNI Hersan, Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjarmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Tampak melepas keberangkatan Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Gubernur Bali I Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra, serta Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb. Putu Suahyadi. ● han

## Indonesia Berencana Beli 12 Jet Tempur Mirage Bekas Qatar

**JAKARTA (IM)** - Indonesia berencana membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas milik Angkatan Udara Kerajaan Qatar. Pembelian 12 jet tempur ini untuk mempertebal kekuatan pertahanan udara nasional.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut rencana pembelian selusin Mirage tersebut masih dalam proses negosiasi.

"Sedang dalam proses negosiasi," kata Dahnil melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (17/11) siang.

Dahnil mengatakan, rencana pembelian Mirage milik Qatar diharapkan sebagai langkah transisi kekuatan sebelum enam jet Rafale pesanan pertama Indonesia tiba di Tanah Air sekitar 2026 mendatang.

"(Masih) proses negosiasi, dengan harapan (Mirage) menjadi transisi kekuatan sebelum Rafale datang yang masih membutuhkan waktu," kata Dahnil.

"Sebagai interim agar kekuatan kita ready alias siap sedia, maka dilakukan negosiasi pesawat-pesawat tempur yang sudah ready," katanya menambahkan.

Meski demikian, ia memastikan bahwa upaya pembelian Mirage tersebut belum

ada keputusan. "Belum ada keputusan," ujar Dahnil.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan, Indonesia akan terus mengejar pesawat tempur canggih. Kehadiran pesawat tempur canggih itu untuk membangun kekuatan pertahanan negara ke depan.

"Jadi Saudara-saudara, strategi kita, kita akan tetap mengejar yang canggih, sambil membangun kemampuan kita dan melengkapi dengan teknologi-teknologi yang lain," kata Prabowo ketika memberikan sambutan dalam Seminar Nasional "Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan" yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11) lalu.

"Rafale kita kejar, F-15 (F-15EX) kita mungkin kejar, kita kejar, tetapi sementara kita akan pacu kemampuan kita membuat pesawat-pesawat kita sendiri," ujar Prabowo.

Prabowo juga meyakini bahwa beberapa tahun mendatang Indonesia mampu menciptakan pesawat tempur canggih karya anak bangsa sendiri. ● han

## DPR Baru Bacakan Surpres Revisi UU ITE yang Dikirim Tahun Lalu

**JAKARTA (IM)** - Ketua DPR Puan Maharani membacakan Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, pada Kamis (17/11).

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden nomor: R58 tanggal 16 Desember tentang rancangan UU perubahan kedua UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE," kata Puan, dalam rapat tersebut.

Selain Surpres revisi UU ITE, DPR juga menerima sejumlah surat lainnya yang dibacakan dalam rapat paripurna. Surat kedua dari pemerintah yaitu bernomor R45 tentang RUU Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India mengenai kerja sama pertahanan.

Berikutnya, DPR juga menerima Surpres Nomor R46, R52, R54, R55, R57, R59. "Surat itu) perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan dua besar Indonesia untuk negara sahabat," ucap Puan.

Lebih lanjut, DPR juga disebut menerima surat R48 perihal pembahasan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons).

Sementara informasinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku sudah mengirimkan Surpres ke DPR terkait revisi UU ITE itu sejak Desember 2021.

"Surat sudah ditandatangani Presiden, dan surat Presiden tersebut sudah dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021 lalu," ujar Mahfud MD, Jumat (24/12) lalu. ● han

### PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT SOLUSI AGRIKULTUR DIGITAL, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diorganisasikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan alamat kantor di NEO SOHO RESIDENCE UNIT 3820 DAN 3805 JL. LETJEN S. PARMAN NO.KAV.28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta ("PERSEROAN"), dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan akan melakukan pengambilalihan terhadap sebagian besar saham kepada pihak ketiga ("Penggalian Saham").

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka apabila ada pihak yang berkeberatan atas rencana pengalihan Saham, dapat mengajukan keberatannya kepada Perseroan L.P. Tuan Hari telepon +62 8571-1196-6599, dengan alamat tersebut di atas, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 18 November 2022  
Direksi PT SOLUSI AGRIKULTUR DIGITAL

# 2 Polhukam

FOTO: FRANS



### SYUKURAN PANITIA NASIONAL PELAKSANAAN G20

Sebelum bertolak menuju Bangkok, Thailand, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menghadiri Syukuran Panitia Nasional Pelaksanaan G20 Tahun 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center pada Kamis (17/11). Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

## Kejagung akan Dampingi BPOM untuk Hadapi Gugatan Kasus Gagal Ginjal Akut

Kejagung siapkan tuntutan pidana dan perdata terhadap perusahaan farmasi terkait obat sirup tercemar kandungan EG dan DEG, penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

**JAKARTA (IM)** - Kejaksanaan Agung akan memberikan bantuan hukum kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak terkait peredaran obat yang diduga menyebabkan gagal

ginjal akut. Hal itu dikatakan Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana setelah Ketua BPOM, Penny Lukito meminta bantuan hukum dari Kejaksanaan Agung (Kejagung) untuk kasus yang membuat 194 anak-anak meninggal

dunia karena gagal ginjal akut.

"Dari BPOM meminta bantuan hukum terkait dengan gugatan dari beberapa pihak perusahaan, gugatan keperdataan maupun PTUN," kata Ketut, Kamis (17/11).

Aatas permintaan Ketua BPOM tersebut, Jaksa Agung akan membantu BPOM. Pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melawan penggugat.

"Pak Jaksa Agung siap mendukung BPOM dalam hal penegakan hukum. Karena itu merupakan tugas dan kewajibannya apalagi perkara-

perkara tersebut menimbulkan korban anak-anak yang banyak," katanya.

Sebelumnya, BPOM digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia ke PTUN terkait kasus obat sirup. Gugatan telah teregistrasi di PTUN Jakarta tanggal 11 November 2022 dengan nomor perkara 400/G/IT/2022/PTUN/JKT.

Pidana dan Perdata

Sementara itu, Kejagung mempersiapkan tuntutan pidana dan perdata kepada tersangka perusahaan farmasi terkait asus ginjal akut pada anak-anak. Dua jalur hukum tersebut bagian dari rencana strategi hukum menindak produsen obat-obatan yang mengandung emaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

Ketut Sumedana menerangkan, jalur pidana maupun perdata terhadap perusahaan farmasi tersebut merupakan salah satu hasil dari pertemuan Jaksa Agung ST Burhanuddin

dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

"Untuk perusahaan-perusahaannya, tadi disampaikan tidak hanya dikenakan suatu tindak pidana sekaligus dilakukan gugatan perdata. Ganti rugi kepada negara atau kepada korban," katanya.

Kejagung saat ini sudah menerima tiga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus itu. Dua SPDP yang diterbitkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM dan satu oleh Bareskrim Mabes Polri.

Dia perusahaan yang disidik oleh BPOM ialah PT Yarindo Farmatama, dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Sementara yang disidik oleh Bareskrim Mabes Polri ialah PT Afi Farma.

"Yang baru kita (Kejagung) terima itu SPDP. Biasanya setelah SPDP ada penetapan tersangka dari hasil penyidikan," ujarnya Ketut. ● han

## Usut Suap Pengurusan Perkara MA, KPK Periksa Pensiunan Mahkamah Agung

**JAKARTA (IM)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pensiunan pegawai Mahkamah Agung (MA), Ramli M Sidik, Kamis (17/11). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Ramli M Sidik SH, Pensiunan MA," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (17/11).

Belum diketahui apa yang bakal dialami penyidik dari keterangan Pensiunan MA tersebut. Diduga, keterangan saksi tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

KPK telah menetapkan tersangka baru hasil pengembangan perkara dugaan suap yang menjerat Hakim nonaktif MA, Sudrajad Dimiyati (SD). Salah satu tersangka baru tersebut dikabarkan adalah Hakim MA, Gazalba Saleh (GS).

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA. 10 orang tersebut yakni, Hakim nonaktif MA, Sudrajad Dimiyati (SD); Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (EIP).

Kemudian, empat PNS MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Selanjutnya, dua Pengacara Theodoros Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas pu-

tusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. Rinciannya, Desy Yustria mendapatkan jatah sebesar Rp250 juta; Muhajir Habibie sebesar Rp850 juta; Elly Tri Pangestu sebesar Rp100 juta; dan Sudrajad Dimiyati sebesar Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disanggakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal, dan Albasri yang merupakan pihak penerima suap disanggakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ● mei

## Papua Barat Daya Resmi Jadi Provinsi Ke-38 di Indonesia

**JAKARTA (IM)** - Ketua DPR RI Puan Maharani sahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam Sidang Paripurna DPR RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (17/11).

Dengan Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan tersebut sah menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.

Puan Maharani awalnya memanggil Ketua Komisi II DPR RI Dolly Ahmad Kurnia, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam ruang sidang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Pembacaan hasil Rapat Komisi II DPR soal RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya kemudian dibacakan oleh anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus. Setelah membacakan laporannya Guspari Gaus kemudian kembali ke kursi anggota dewan.

"Terima kasih kepada perwakilan Komisi II bapak Guspari Gaus. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Papua Barat Daya tersebut dapat disetujui? Setuju ya semua," ucap Puan Maharani.

Puan kemudian mengetuk palu tanda pengesahan. Setelah itu, Puan kembali bertanya kepada para anggota DPR yang hadir.

"Apakah RUU Papua Barat Daya tersebut dapat disetujui untuk menjadi UU?," tanya

Puan Maharani kepada anggota DPR.

"Setuju ....," jawab para anggota DPR dan Puan Maharani serentak. Puan pun kemudian kembali mengetuk palu kedua kalinya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebutkan Provinsi Papua Barat Daya ini provinsi ke-38 di Indonesia.

"Kini kita utamakan berkolaborasi agar provinsi baru ini bisa ada secara de jure dan de facto. Pembentukan provinsi ini urusan DPR dari aspirasi masyarakat dan disetujui pemerintah," ucap Tito Karnavian.

Ia berharap dengan pembentukan RUU tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. "Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal hingga operasionalisasi Provinsi Papua Barat Daya bisa berjalan dengan baik," tutup Tito Karnavian. ● han

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pemutusan Keputusan Rapat PT CITRA BUANA PERMANA ("PERSEROAN") tertanggal 15 Nopember 2022, No. 07, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH, L.L.M., Para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk melakukan pembubarahan dan proses likuidasi terhadap Perseroan dan kepada Kreditor yang mempunyai hak tagih kepada Perseroan dapat mengajukan tagihan-tagihannya kepada Perseroan (Kantor Perseroan) dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai bukti-bukti yang sah.

Demikianlah Pengumuman ini guna memenuhi pasal 147 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

TTD  
Likuidator Perseroan



### PENGESAHAN RUU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan laporan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan provinsi Papua Barat Daya kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPR Sumfi Dasco Ahmad (kanan) dan Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Dalam rapat paripurna tersebut DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

### PENGUMUMAN

PT. TALANA SUKSES MAJU ("Perseroan")  
Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 November 2022, telah diambil keputusan untuk menyetujui pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan di alamat SOHO CAPITAL @Podomoro City Lt. 16 Suite 16-06A, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470

Jakarta, 18 November 2022  
DIREKSI